

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI FORUM KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PENGUATAN JEJARING ANTAR
LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
SEMARANG, 24 FEBRUARI 2023

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memperjuangkan kesetaraan perempuan atau keadilan gender bukan berarti melawan kaum laki-laki. Tapi memperjuangkan hak kaum perempuan yang sejauh ini masih terpinggirkan di berbagai sektor kehidupan. Masih terjadi ketimpangan peran dan hak, karena budaya patriarki dengan relasi kuasa yang kuat. Kondisi tersebut kerap menjadikan kaum perempuan merasa rancu dengan apa yang harus diperjuangkan. Masih banyak perempuan maupun laki-laki yang kesulitan membedakan bentuk-bentuk ketidaksetaraan peran dan ketidakadilan gender.

Dalam berbagai workshop keadilan gender telah membagi persoalan mendasar ketidakadilan gender ke dalam lima bentuk yang harus dipahami bersama, baik laki-laki maupun perempuan. *Pertama, stereotype*. Yakni, pelabelan negative terhadap salah satu pihak atas nama jenis kelamin. *Kedua, subordinasi*, yakni sikap merendahkan posisi/status sosial salah satu jenis kelamin. *Ketiga, marginalisasi* atau peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses atau partisipasi publik. *Keempat*, beban ganda atau beban berlebihan, artinya membebankan tugas-tugas yang tidak proporsional dan tidak seimbang sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas hidup. Dan *kelima*, kekerasan, yakni perlakuan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

Kelima bentuk ketidakadilan gender tersebut masih perlu di-*breakdown* secara rinci ke dalam berbagai lini kehidupan. Tidak hanya dalam mengkritisi ketimpangan kebiasaan hidup sehari-hari dalam budaya patriarki. Tapi juga harus mengkritisi dan menganalisa kebijakan pemerintah, apakah sudah merepresentasikan keberpihakan terhadap perjuangan keadilan gender dan

kesetaraan perempuan atau belum. Perjuangan penyadaran dan penyamaan persepsi di berbagai lini kehidupan ini bukan hal mudah. Tapi perjuangan panjang yang harus disertai persamaan persepsi dan tekad yang selaras.

Tidak hanya itu, kebutuhan lain adalah bagaimana menyosialisasikan progress perjuangannya, dibutuhkan kemampuan merekonstruksi fakta ke dalam Bahasa tulis. Tetapi ketrampilan teman-teman dalam menuliskan isu gender belum maksimal, sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas untuk hal tersebut.

Karena itulah, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Forum Keadilan dan Kesetaraan Gender (FKKG) Jawa Tengah akan mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota FKKG yaitu Workshp Analisis Kebijakan dan Penulisan Artikel melalui Rapat Koordinasi FKKG Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya koordinasi, meningkatkan kapasitas para anggota sehingga ada kesamaan persepsi dalam arah gerak perjuangan. Dengan peningkatan kapasitas dan kesamaan persepsi ini, memudahkan para pejuang kesetaraan dalam melangkah, terutama dalam membangun kesamaan gerak dengan para pengambil kebijakan. Dalam hal ini terkait kebijakan publik dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Peghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 00685/DPA/2023 tentang Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- A. Membuat evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan tahun 2022;
- B. Meningkatkan kemampuan anggota FKKG dalam melakukan analisis kebijakan;
- C. Peningkatan kemampuan penulisan artikel dan *press release* untuk memudahkan sosialisasi kepada masyarakat luas.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Adanya evaluasi program kerja untuk menjadi perbaikan program selanjutnya;
2. Anggota FKKG memiliki kemampuan untuk melakukan Analisis Kebijakan;
3. Anggota FKKG memiliki ketrampilan dalam penulisan artikel dan *press release* untuk memudahkan sosialisasi kepada masyarakat luas.

II. SASARAN

Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kesetaraan Dan Keadilan Gender Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah pengurus, staf, relawan dan komunitas dari anggota FKKG Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 Orang.

III. PELAKSANAAN

Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Februari 2023

Jam : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kartini Lantai II

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

IV. MATERI, NARASUMBER, FASILITATOR, DAN MODERATOR

1. Narasumber :

- Dr. Indra Kertati, M, Si (Ketua LPPSP Semarang)
- Edi Faisol (Pemred SinPo.id)

2. Fasilitator

Tsaniatus Solihah (Ketua FKKG Prov Jateng)

3. Moderator

Pande Made Ratih W.SP (Bendahara FKKG Jateng)

V. JADWAL KEGIATAN

Terlampir

VI. SUMBER DANA

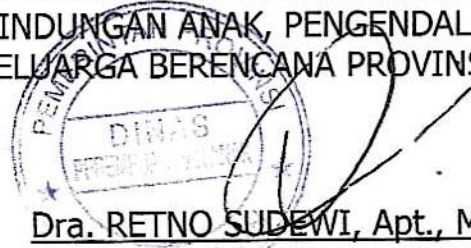
Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

VII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tahun 2023.

Semarang, 21 Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

JADWAL KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI FORUM KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PENGUATAN JEJARING ANTAR
LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
SEMARANG, 24 FEBRUARI 2023

Waktu	Uraian Kegiatan	Keterangan
08.00 - 08.30	Registrasi	
08.30 - 09.00	Pembukaan Mendengarkan Lagu Wajib Indonesia Raya Laporan Panitia Sambutan Sekaligus Membuka Acara Doa	Kabid Data dan Parmas Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Panitia
09.00 - 09.30	Sessi 1 Laporan Kegiatan FKKG Tahun 2022	Tsaniatus Solihah,S.E
09.30 - 11.30	Sessi 2 Paparan Narasumber I (Analisis Kebijakan di Jawa Tengah) Praktek I	Dr.Indra Kertati,M,Si + Moerator Fasilitator
11.30 - 13.00	Ishoma	Panitia
13.00 - 15.00	Sessi 3 Paparan Narasumber II (Teknik Menulis Artikel dan Pers Release) Praktek II	Ida Nor Layla + Moderator Fasilitator
15.00-15.30	Penutup	Fasilitator